

Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara

Jalal Luddin^a, Riska Rahmawati^b, Suparwi^c

^{abc}Institut Agama Islam Negeri Kudus

Corresponding author: 058jalalluddin@gmail.com

Abstract

This research was conducted to analyze the level of criteria for the effectiveness and efficiency of the implementation of the budget in the regional planning and development agency in Jepara Regency. The data used is secondary data obtained from supporting documentation and literature as well as the official website of BAPPEDA Jepara Regency using financial realization reports from 2017 to 2022. The analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The results of the study show that the budget level of the regional planning and development agency in Jepara Regency is in the category of effective and efficient. Effectiveness has been carried out, with the results of the data indicating that the program that has been realized is close to the expected target. As for efficiency, it is proven by the direct expenditure budget each year that is used to run previously planned programs that do not approach the actual expenditure value.

Keywords: effectiveness, efficiency, budget

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kriteria efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi dan literatur yang mendukung serta web resmi BAPPEDA Kabupaten Jepara dengan menggunakan laporan realisasi keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat anggaran belanja badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara berada dalam kategori efektif dan efisien. Efektivitas telah dilakukan, dengan hasil data yang menunjukkan bahwa program yang telah direalisasikan mendekati target yang diharapkan. Sedangkan untuk efisiensi, dibuktikan dengan anggaran belanja langsung tiap tahun yang digunakan untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya tidak mendekati nilai realisasi belanja.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, anggaran belanja

PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti halnya sekarang ini dimana masyarakat menginginkan peningkatan reformasi, hal ini menjadikan peran sistem akuntansi sangat dibutuhkan khususnya sebagai alat pencatatan. Peran akuntansi tersebut sekarang tidak hanya untuk kepentingan manajemen dari suatu perusahaan, namun selain itu juga sebagai tanggungjawab perusahaan kepada pihak yang memerlukan atau memiliki kepentingan. Hal ini juga berkembang dalam pemerintahan dimana pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Selain itu perkembangan akuntansi dalam pemerintah ini juga bisa kita lihat dari laporan pemerintah yang sudah disebarluaskan di berbagai media internet (Lasupu 2021).

Pembangunan di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan. Pada tahun 2022 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan capaian pekerjaan yang bagus yaitu telah memberikan efek topangan terhadap ekonomi negara serta memberikan efek dalam peningkatan daya saing yang positif. Kenaikan indeks Daya saing Indonesia yang sebelumnya berada pada peringkat 41 menjadi 36. Kenaikan indeks juga terjadi pada daya saing infrastruktur yang semula berada pada peringkat 60 naik pada peringkat 52. Selain berpacu pada data diatas pembangunan insfrastruktur khususnya pada pembangunan jalan toll memang telah kita nikmati manfaatnya. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan akses dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih mudah dan memberikan efek yang baik terhadap peningkatan ekonomi Indonesia khususnya pada tiap masing-masing daerah (Larasati 2022).

Perencanaan pembangunan setiap daerah di Indonesia merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah bisa konsisten, sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pusat bisa saling berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga dapat dilaksanakan secara bersamaan oleh para pemegang kepentingan dan wewenang sesuai dengan porsinya masing- masing. Sesuai dengan kondisi riil dalam tiap daerah memiliki peran penting untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah sesuai dengan visi misi yang akan ditempuh. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah RI 2004).

Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat pelaksanaannya baik tingkat nasional maupun daerah tentu menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan pendapatan negara ataupun daerah tergantung dari kepentingan pembangunan masing-masing. Penggunaan anggaran ini diharapkan bisa sesuai dengan cita-cita pemerintah yang akan dicapai yang telah dibuat pemerintah dalam rencana strategi, dengan kata lain untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus dalam penggunaan anggaran harus seefektif dan seefisien mungkin. Penggunaan anggaran sudah atau belum efektif dan efisien bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran (Lasupu, 2021).

Laporan Realisasi Anggaran menurut adalah laporan yang berisi informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya (Fauziah 2018). Laporan ini memiliki manfaat bagi pengguna laporan dalam pengevaluasian dan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan dalam pelaporan terhadap anggaran dengan memberikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi serta memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang telah dilakukan secara menyeluruh untuk pengevaluasian kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran sudah atau belum efektif dan efisien.

Laporan realisasi anggaran memiliki manfaat sebagai alat prediksi seberapa besar perolehan sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau

daerah pada periode atau tahun yang akan datang dengan menyajikan laporan yang komparatif. Indikasi perolahan dan penggunaan dari sumber daya ekonomi yang disediakan laporan realisasi anggaran kepada para pengguna laporan diantaranya yang pertama, telah terlaksana secara efektif, efisien, dan hemat. Kedua, telah terlaksana sesuai anggaran baik APBN atau APBD. Ketiga, telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lasupu, 2021).

Prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran adalah cara yang dilakukan untuk memanfaatkan uang dengan sebaik mungkin dengan harapan mendapatkan perbaikan kedepannya bagi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, penggunaan anggaran ini didapati kelemahan yang sama yaitu kurangnya daerah yang mengembangkan instrumen teknis perencanaan dengan memberikan prioritas pada kinerja, bukan pada pendekatan incremental dimana pendekatan tersebut memiliki landasan pertimbangan yang lemah. Hal ini diharapkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang jelas (Trianto, 2016).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa yaitu berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi, beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sumenge 2013) dengan penelitiannya dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis tersebut menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat dan kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan mulai tahun 2008 hingga 2012 menghasilkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2010 merupakan capaian tertinggi pada tingkat efektivitas sedangkan pada tahun 2011 merupakan capaian tingkat efektivitas terendah. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010 bisa dikatakan efektif dan pada tahun 2011 bisa dikatakan kurang efektif. Pada tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008 hingga 2012, secara keseluruhan anggaran tersebut diolah secara baik. Tahun 2008 hingga 2011 masuk ke dalam kategori sangat efisien dan pada tahun 2011 masuk dalam kategori efisien.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rondonuwu, Tinangon, dan Budiarmo pada tahun 2015 yang melakukan analisis pada pendapatan dan belanja daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa apakah sudah dilakukan dengan efisien dan efektif. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian tersebut menggunakan acuan pedoman penilaian dan kinerja keuangan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dengan memperoleh hasil yaitu pada tahun 2010 hingga 2014 rata-rata memperoleh hasil dengan efektif. Namun, pada tahun tersebut secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa masih terbilang kurang efisien hal ini dikarenakan masih tingginya pengeluaran daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Rampengan, Nangoi, dan Manossoh (2016) dengan menganalisis apakah sudah atau belum efektif dan efisien pelaksanaan anggaran belanja pada perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA Kota Manado. Penelitian tersebut menghasilkan tingkat efektivitas anggaran belanja BAPPEDA mengalami kenaikan dan penurunan dari awal tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2014 dan 2015 anggaran belanja BAPPEDA bisa terbilang baik, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut masuk ke

dalam kriteria cukup efektif. Namun, pada tahun 2011, 2012, dan 2013 kriteria tersebut tidak didapatkan dan hanya masuk ke dalam kriteria kurang efektif, hal ini dikarenakan masih jauhnya target dari anggaran belanja yang terdapat pada realisasi anggaran belanja.

Paat, Nangoi, dan Pusung (2019) melakukan penelitian yang sama yaitu melakukan analisis apakah pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Kota Tomohon sudah masuk dalam kriteria efektif dan efisien. Penelitian tersebut menghasilkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Kota Tomohon dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami perubahan tip tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas berada pada kriteria efektif, dan pada tahun 2016-2017 berada pada kriteria cukup efektif, namun hal tersebut masih bisa dikatakan adanya penurunan dari yang semula efektif menjadi cukup efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015 berada pada kriteria sangat efisien dan pada tahun 2016 mengalami penurunan ke kriteria efisien, namun 2017 kembali naik ke kriteria sangat efisien.

Berdasarkan pada penjelasan dan beberapa penelitian terdahulu maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang sama yaitu berfokus pada efektivitas dan efisiensi.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu seni yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan pencatatan suatu transaksi dari peristiwa yang memiliki kaitan dengan keuangan dengan tujuan memperoleh informasi laporan keuangan yang memiliki manfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan (Sumarsan 2011). Selain itu akuntansi juga memiliki pengertian sebagai suatu seni yang dilakukan dengan cara mencatat, mengkategorikan, meringkas, dan memberikan hasil laporan transaksi sedemikian rupa dengan isi yang sistematis dan sesuai standar (Bahri 2016).

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan suatu seni yang dilakukan dengan proses yang sistematis dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan berupa laporan dari kegiatan ekonomi yang akan berguna bagi pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki pengertian suatu teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang digunakan sebagai alat pengelola dana yang bersumber dari masyarakat, hal ini digunakan oleh lembaga-lembaga tinggi di pemerintahan dan departemen yang ada dibawahnya (Bastian 2014). Selain itu akuntansi sektor publik memiliki arti sebagai suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan guna memberikan informasi dari sifat keuangan yang berdasar pada otoritas publik dengan informasi yang kuantitatif, yang memiliki manfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (Halim 2014). Selain itu juga akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai suatu alat yang menyediakan

informasi untuk pemerintah dan masyarakat yang berisikan informasi pelaporan dan pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu teknik akuntansi yang digunakan untuk memberikan pelayanan berupa informasi pelaporan dan pengendalian manajemen yang memiliki manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Anggaran

Anggaran menurut memiliki pengertian sebagai suatu rencana kerja dimana salah satu pihak memuat perkiraan penerimaan yang diperoleh di masa pada saat ini dan satu pihak memuat pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kepentingan negara yang akan datang (Marsono 1957). Sedangkan dalam pengertian lain anggaran merupakan suatu rencana yang memiliki sifat tertulis yang berada dalam suatu kegiatan keorganisasian, ditulis dalam periode tertentu dan berbentuk kuantitatif, hal tersebut biasanya berbentuk dalam satuan moneter (Nafarin, 2007).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang dibuat dalam satu periode dan akan digunakan sebagai perkiraan penerimaan saat ini dan perkiraan pengeluaran negara yang akan datang.

Konsep Anggaran Sektor Publik

Sektor anggaran publik memiliki pengertian sebagai suatu rencana kerja yang disajikan dalam bentuk moneter dan berisi daftar pendapatan dan pengeluaran (Bastian 2014). Sedangkan dalam pengertian lain menjelaskan bahwa sektor anggaran publik merupakan suatu anggaran yang tersaji dalam APBN dan APBD yang menjelaskan mengenai perencanaan keuangan yang akan terjadi di masa depan dalam hal penerimaan, pengeluaran, surplus ataupun defisit, pendanaan, program dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang (Mahmudi, 2016)

Berdasarkan dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor anggaran publik adalah suatu rencana kerja yang disajikan dalam satuan moneter berisi penerimaan, pengeluaran, surplus ataupun defisit, pendanaan, program dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdapat dalam APBN dan APBD

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memiliki pengertian sebagai suatu laporan kinerja anggaran yang berisi gambaran mengenai darimana sumber diperoleh dan kemana penyalurannya, serta penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, selain itu juga memberikan perbandingan dari periode pelaporan antara anggaran dan kinerja yang dilakukan Rasdianto (2013). Selain itu laporan realisasi anggaran adalah suatu laporan yang di dalamnya harus terdapat unsur pendapatan, belanja, trnasfer, surplus ataupun defisit, pembiayaan, dan sisa ataupun kurang dalam pembiayaan (Siregar, 2015)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan suatu laporan kinerja yang berisi pendapatan, penggunaan, surplus atau deifisit dan dijadikan sebagai perbandingan antara anggaran dan kinerja pada periode tertentu.

Belanja Daerah

Belanja daerah di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan sebagai semua kewajiban daerah yang dianggap sebagai suatu nilai pengurangan kekayaan bersih yang terdapat pada periode tahun anggaran yang berkaitan (Peraturan Pemerintah RI 2014). Selain itu, belanja daerah memiliki pengertian lain yaitu semua jenis pengeluaran yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan pengurangan terhadap saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang berkaitan yang tidak memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah (Siregar, 2015).

Berdasarkan pada Undang-Undang diatas dan pendapat Baldric Siregar dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan segala jenis pengurangan yang bisa mempengaruhi nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu dan tidak memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah (Peraturan Pemerintah RI 2005). Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penetapan dan penyusunan APBD teruntuk daerah yang belum terdapat DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan BLUD (Peraturan Pemerintah RI 2006)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan belanja dan daerah di dalam bukunya Baldric Siregar yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik*, dijelaskan sebagai suatu rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berisikan seluruh pendapatan maupun pengeluaran dan belanja maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka untuk tercapainya sasaran pembangunan yang akan dilakukan dalam waktu satu tahun dan dinilai berdasarkan pada satuan moneter dan telah disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Perundangan atau dengan kata lain dalam Peraturan Daerah (Siregar, 2015).

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu alat sebagai tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2018). Selain itu dalam pengertian lain efektivitas memiliki pengertian sebagai suatu hubungan yang memiliki kaitan antara hasil dan tujuan,

atau dengan kata lain suatu alat yang digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat produksi, kebijakan maupun prosedur yang ingin dicapai dalam organisasi (Pekei, 2016).

Berdasarkan pada dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur sejauh mana suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Tingkat efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, kriteria efektivitas terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kinerja Efektifitas Keuangan

No	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kepmendagri 1996)

Efisiensi

Efisiensi menurut Sedarmayanti adalah suatu ukuran penggunaan sumber daya dalam suatu proses, semakin sedikit sumber daya yang digunakan maka semakin efisien (Sedarmayanti 2018). Sedangkan menurut Mahmudi memberikan pengertian bahwa efisiensi adalah suatu perbandingan yang ditujukan pada suatu output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Konsep efisiensi hampir identik dengan produktivitas suatu program organisasi atau suatu kegiatan yang dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output yang banyak dengan sumber daya yang sedikit. Efisiensi memiliki makna hati-hati dalam menggunakan anggaran atau sering disebut *spending well* (Mahmudi, 2016).

Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Tidak Efisien
2	90%-100%	Kurang Efisien
3	80%-90%	Cukup Efisien
4	60%-80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber: (Kepmendagri 1996)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur serta web resmi BAPPEDA Kabupaten Jepara. Adapun data yang digunakan yaitu laporan realisasi keuangan BAPPEDA Kabupaten Jepara dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang telah dipublikasikan pada situs BAPPEDA Kabupaten Jepara sebagian dan sebagian didapatkan langsung ke kantor BAPPEDA Kabupaten Jepara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan seberapa efektif dan efisien pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Jepara dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	13.995.050.000	12.770.040.332	91,25	Efektif
2018	10.829.727.000	10.400.147.765	96,03	Efektif
2019	11.928.572.000	11.316.654.345	94,87	Efektif
2020	8.742.512.000	8.043.616.272	92,01	Efektif
2021	8.781.663.525	8.516.480.457	96,98	Efektif
2022	744.269.000	699.573.250	93,99	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan pada hasil olah data tabel 3 diatas mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Jepara untuk periode 2017 hingga 2022 dapat diketahui bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yaitu sebesar 4,78% dan 4,97% namun masih dalam kategori efektif. Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,16%,

tahun 2020 penurunan sebesar 2,86% dan tahun 2022 penurunan terjadi sebesar 2,99% atau bisa dikatakan sebagai angka penurunan tertinggi dalam periode 2017 hingga 2022.

Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui tingkat efektivitas dalam periode 2017 hingga 2022 tingkat efektivitas paling rendah berada pada tahun 2017 dimana hanya mendapatkan nilai tingkat efektivitas sebesar 91,25%. Sedangkan tingkat efektivitas tertinggi dalam periode 2017 hingga 2022 berada pada tahun 2021 yang mencapai nilai tingkat efektivitas sebesar 96,98%. Perbandingan antara tingkat efektivitas tertinggi dan terendah yaitu pada tahun 2021 dan 2017 diperoleh selisih nilai tingkat efektivitas sebesar 5,73%. Hal tersebut termasuk ke dalam nilai yang besar jika dilihat dari selisih nilai peningkatan atau penurunan tingkat efektivitas pada periode 2017 hingga 2022.

Berdasarkan data tersebut jika dilihat secara keseluruhan dari periode 2017 hingga 2022, tingkat anggaran belanja (BAPPEDA) Kabupaten Jepara masih dalam keadaan baik walaupun tiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan tingkat efektivitas. Namun, peningkatan dan penurunan tersebut masih berada dalam kategori efektif karena berada pada kisaran presentase 90% sampai dengan 100%.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh (BAPPEDA) Kabupaten Jepara juga bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari anggaran tiap tahun yang digunakan untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya telah mendekati target yang diharapkan. Selain itu, pengelolaan anggaran belanja dalam periode 2017 hingga 2022 bisa dikatakan konsisten karena mendapatkan nilai kategori efektif tiap tahunnya.

Tabel 4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	8.808.176.545	12.770.040.332	68,98	Efisien
2018	6.341.393.400	10.400.147.765	60,97	Efisien
2019	6.926.787.198	11.316.654.345	61,21	Efisien
2020	5.607.137.861	8.043.616.272	69,71	Efisien
2021	5.594.297.309	8.516.480.457	65,69	Efisien
2022	6.683.608.685	10.040.489.364	66,57	Efisien

Sumber : Data olahan, 2023

Berdasarkan pada hasil olah data tabel 4 diatas mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Jepara untuk periode 2017 hingga 2022 dapat diketahui bahwa tingkat presentase tingkat efisiensi memperoleh hasil yang berubah-ubah tiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan tingkat efisiensi dari tahun 2017 yang semula sebesar 68,98% menjadi 60,97% atau naik sebesar 8,01%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sedikitnya penggunaan realisasi belanja langsung dari pada realisasi belanja yang digunakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi mengalami penurunan, namun penurunan tersebut hanya sebesar 0,24%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat efisiensi mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 8,5%, hal ini melebihi

nilai presentase tingkat efisiensi pada tahun 2017 yaitu menjadi 69,71%. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi mengalami peningkatan sebesar 4,02% namun hal tersebut tidak berlanjut pada tahun 2022. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kurang dari 1% yaitu sebesar 0,88%.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai selisih presentase sebesar 8,01% dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai selisih presentase sebesar 8,5%. Hal tersebut dikarenakan besarnya penggunaan realisasi belanja langsung dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2020.

Nilai presentase tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran (BAPPEDA) Kabupaten Jepara untuk periode 2017 hingga 2022 menunjukkan hasil yang fluktuasi. Tingkat efisiensi tertinggi berada pada nilai 60,97% pada tahun 2018, namun nilai tersebut masih berada dalam kriteria efisien karena masih berada pada nilai diatas 60%. Tingkat efisiensi terendah berada pada nilai 69,71% pada tahun 2020, namun nilai tersebut masih termasuk dalam kategori efisien karena masih dibawah 80%.

Berdasarkan data tersebut jika dilihat secara keseluruhan dari periode 2017 hingga 2022, tingkat anggaran belanja (BAPPEDA) Kabupaten Jepara berada dalam keadaan baik bahkan mendekati sangat baik pada tahun 2018, walaupun tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dan penurunan nilai presentase efisiensi. Namun, nilai tersebut masih berada dalam kategori efisien.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh (BAPPEDA) Kabupaten Jepara juga bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari anggaran belanja langsung tahun yang digunakan untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya tidak mendekati nilai realisasi belanja dan masuk ke dalam kategori efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran belanja dalam periode 2017 hingga 2022 bisa dikatakan konsisten karena mendapatkan nilai kategori efisien tiap tahunnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN

Berdasarkan data tersebut jika dilihat secara keseluruhan dari periode 2017 hingga 2022, tingkat anggaran belanja (BAPPEDA) Kabupaten Jepara berada dalam kategori efektif dan efisien. Efektivitas telah dilakukan, dengan hasil data yang menunjukkan bahwa program yang telah direalisasikan mendekati target yang diharapkan. Sedangkan untuk efisiensi, dibuktikan dengan anggaran belanja langsung tiap tahun yang digunakan untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya tidak mendekati nilai realisasi belanja.

Berdasarkan keterbatasan, peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah jangka tahun maupun rasio yang diteliti. Sehingga dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Jepara.

REFERENSI

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Cetakan Pe. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Ed.III. Jakarta: Salemba Empat.

- Fauziah, Ifat. 2018. *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edited by Sam. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kepmendagri. 1996. "Kepmendagri. No 690.900.327. Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan."
- Larasati, Mika Putri. 2022. "Mengapresiasi Pembangunan Infrastruktur Demi Menopang Perekonomian." 28 December 2022. 2022. <https://radarsampit.jawapos.com/opini/28/12/2022/mengapresiasi-pembangunan-infrastruktur-demi-menopang-perekonomian/>.
- Lasupu, Erika Z. et.al. 2021. "35780-75832-1-Sm." *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una* 9 (69): 1433–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35780>.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Marsono, M. 1957. *Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia*. Kesatu. Jakarta: Sapta Darma.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Paat, Harry P., Grace B. Nangoi, and Rudy J. Pusung. 2019. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7 (3): 2979–88.
- Pekel, Beni. 2016. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Peraturan Pemerintah RI. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."
- . 2005. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah." <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.
- . 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- . 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." <https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.
- Rampengan, Melania, Grace B.Nangoi, and Hendrik Manossoh. 2016. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (3): 616–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>.
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon, and Novi Budiarto. 2015. "Analisis Efisiensi

- Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.” *Jurnal EMBA* 23 (4): 23–32.
- Sedarmayanti. 2018. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siregar, Baldrice. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Akuntansi Dasar & Aplikasi Dalam Bisnis*. KOTA MAKASSAR: Indeks.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (3): 117. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>.
- Trianto, Anton. 2016. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang.” *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 12 (1): 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>.